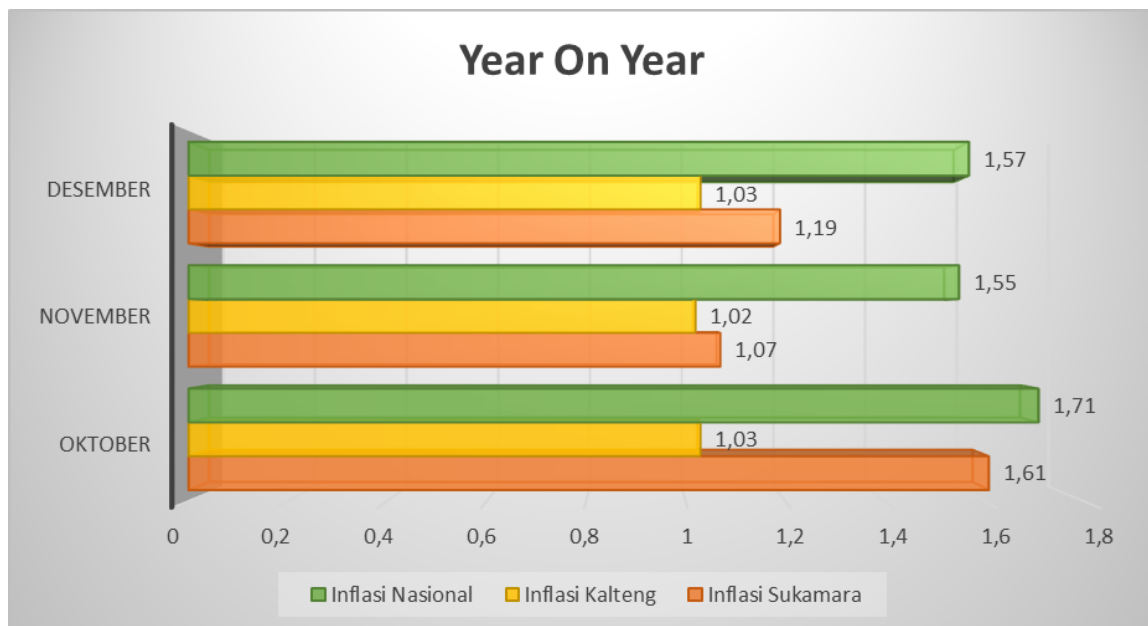
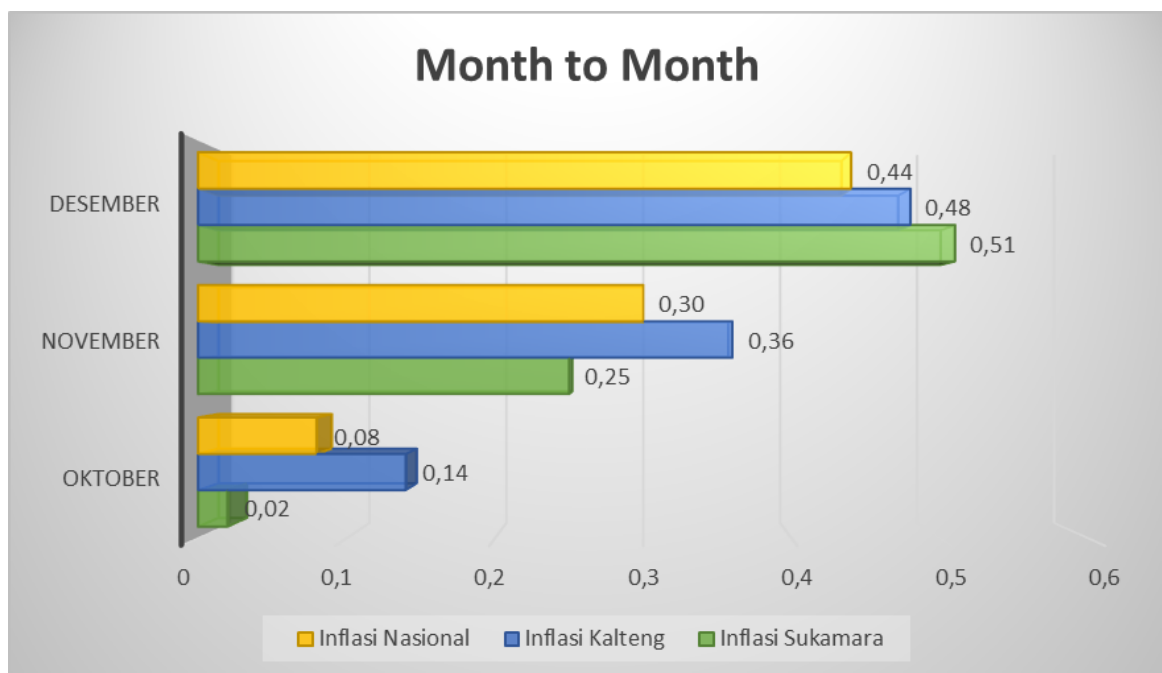


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada tahun 2022 sebanyak 154 Kabupaten/Kota di Indonesia terpilih sebagai sampel Standar Biaya Hidup (SBH) 2022. Di Kabupaten Sukamara sendiri, SBH baru mulai dilaksanakan per Januari 2024 yang sebelumnya SBH mengikut Kabupaten Kotawaringin Timur atau Sampit. Dengan adanya SBH sendiri maka Badan Pusat Statistik sudah bisa menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan daerah. IHK merupakan indikator stabilitas ekonomi dan stabilnya perekonomian dapat dilihat dari laju inflasi.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukamara Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :





Indeks Harga Konsumen

1. Bulan Oktober 2024 inflasi nasional tercatat 1,71% (Y-on-Y), Kalimantan Tengah tercatat sebesar 1,03% (Y-on-Y), sedangkan Kabupaten Sukamara inflasi sebesar 0,02% (M,-to-M) dan angka inflasi sebesar 1,61% (Y-on-Y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,21. Pada bulan Oktober terdapat beberapa komoditas penyumbang inflasi yaitu Daging Ayam ras 0,04%, Telur Ayam ras 0,03%, Kopi Bubuk 0,03% Beras 0,03% dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) 0,02%, sedangkan komoditas pangan yang mengalami penurunan sebagai penyumbang deflasi seperti Tomat 0,05%, Terong 0,04% dan Ikan Nila 0,04%.
2. Bulan November 2024 inflasi nasional tercatat 1,55% (Y-on-Y), Kalimantan Tengah tercatat sebesar 1,02% (Y-on-Y), sedangkan Kabupaten Sukamara deflasi sebesar 0,25% (M-to-M) dan angka inflasi sebesar 1,07% (Y-on-Y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,19. Pada bulan November terdapat beberapa komoditas penyumbang inflasi yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) 0,05%, Kopi Bubuk 0,03%, Kacang Panjang 0,02%, sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu Tomat 0,06%, Bawang Merah 0,03%, Cabai Rawit 0,03%, Telur Ayam Ras 0,02% dan Ikan Nila 0,02%.
3. Bulan Desember 2024 inflasi nasional tercatat 1,57% (Y-on-Y), Kalimantan Tengah tercatat sebesar 1,03% (Y-on-Y), sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 0,51% (M-to-M) dan angka inflasi sebesar 1,19% (Y-on-Y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,03. Pada bulan Desember terdapat beberapa komoditas penyumbang inflasi yaitu Daging Ayam Ras 0,10%, Bawang Merah 0,07% dan Kopi Bubuk 0,06%, sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu Cabai Rawit 0,01 % dan Biskuit 0,01%.

Pada tahun 2022 sebanyak 154 Kabupaten/Kota di Indonesia terpilih sebagai sampel Standar Biaya Hidup (SBH) 2022. Di Kabupaten Sukamara sendiri, SBH baru mulai dilaksanakan per Januari 2024 yang sebelumnya SBH mengikut Kabupaten Kotawaringin Timur atau Sampit. Dengan adanya SBH sendiri maka Badan Pusat Statistik sudah bisa menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan daerah. IHK merupakan indikator stabilitas ekonomi dan

stabilnya perekonomian dapat dilihat dari laju inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari 20 komoditas makanan dan non makanan dengan bobot terbesar dalam diagram timbang SBH di Kabupaten Sukamara tahun 2022, terdapat beberapa komoditas yang sering bergejolak yaitu beras, daging ayam ras, cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, Kopi Bubuk, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Ikan. Memperhatikan komoditas yang sering mengalami perubahan harga tersebut, TPID Kabupaten Sukamara melalui dinas teknis melakukan verifikasi lapangan terhadap penyebab utama meningkatnya harga komoditas tersebut dengan melakukan survey terhadap pedagang langsung, pelaku usaha peternakan atau pertanian, pasokan bahan baku dan pengiriman.

Dari hasil evaluasi TPID Kabupaten Sukamara faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut :

1. Tingginya Harga Kebutuhan Pokok

Tingginya harga kebutuhan pokok yang terjadi diakibatkan oleh adanya kenaikan bahan baku.

2. Ketergantungan ketersediaan pasokan dari daerah lain

Kabupaten Sukamara terletak diantara Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau serta berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar pasokan diperoleh dari Pangkalan Bun ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulau Jawa. Pasokan yang kita dapat dari Pangkalan Bun juga merupakan pasokan yang di peroleh dari Pulau Jawa. Panjangnya rantai distribusi membuat peningkatan harga jadi berkali - kali baik secara pedagang maupun karena angkutan. Masyarakat Kabupaten Sukamara sudah bisa memenuhi kebutuhan pasokan komoditas pangan meskipun masih dalam skala kecil dan dalam jumlah terbatas, dengan bahan penunjang yang masih diperoleh dari daerah lain juga.

3. Berkurangnya pasokan komoditas

Masih besarnya ketergantungan bahan penunjang dari daerah lain membuat hasil pertanian atau peternakan menjadi pasang surut, terutama yang masih sangat bergantung dengan musim/alam sehingga stabilitas harga menjadi lebih sulit terkontrol. Menyikapi kondisi harga komoditas beras, daging ayam ras, tomat, kopi bubuk, bawang merah, ikan dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) hasil verifikasi lapangan dikarenakan permintaan yang meningkat. Peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional dan beberapa event besar di Kabupaten Sukamara seperti Natal dan Tahun Baru membuat beberapa komoditas pangan meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Cuaca ekstrim berupa hujan dan angin ribut yang sudah berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia membuat beberapa daerah beras, pemasok tomat, bawang merah dan cabe kebanjiran sehingga komoditas menjadi gagal panen, sementara di Kabupaten Sukamara sebagian besar komoditas beras, tomat, bawang merah dan cabe masih di pasok dari luar daerah. Untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Kopi Bubuk permintaan meningkat dengan adanya event besar di Kabupaten Sukamara yang pada akhirnya berpengaruh pada aktivitas masyarakat membuat harga meningkat juga.

4. Biaya transportasi angkutan yang tinggi

Kenaikan BBM menjadi penyumbang terbesar inflasi di Indonesia yang menyebabkan biaya transportasi naik sehingga untuk sampainya komoditas pangan dari sentra produksi ke konsumen yang melewati arus transportasi yang tidak pendek memerlukan biaya yang tinggi. Pengaruh faktor distribusi tersebut sangat mempengaruhi juga terhadap komoditas, pengaruh iklim/cuaca pun dapat menyebabkan distribusi bisa terganggu, infrastruktur yang belum memadai juga bisa menyebabkan biaya transportasi semakin tinggi. Meskipun sekarang sudah ada kebijakan pemerintah pusat untuk mulai menstabilkan BBM namun tidak diikuti dengan penurunan biaya transportasi di daerah.

5. Peningkatan Angka Pengangguran

Selain lapangan pekerjaan yang terbatas juga ada faktor internal dari para pencari kerja yang umumnya kualifikasi dan kemampuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dicari oleh perusahaan.

6. Peningkatan Permintaan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Dan Event Besar

Sudah menjadi kebiasaan pada saat Bulan Puasa atau Ramadhan yang dilanjutkan dengan Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha bagi umat muslim permintaan bahan pokok akan meningkat dan akan mempengaruhi harga pasar yang menyebabkan IHK mengalami kenaikan. Peringatan Hari Besar Nasional atau Perayaan Hari Jadi Kabupaten yang di barengi dengan event - event besar juga mempengaruhi harga dan pasokan komoditas.

7. Kebijakan Pemerintah

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat menjadi faktor penting penyumbang terbesar inflasi yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan pada akhir tahun 2022 melalui Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pemanfaatan dana Biaya Tak Terduga untuk menanggulangi tingginya tingkat inflasi atas kebijakan yang sudah ditetapkan. Kebijakan yang sangat berpengaruh tersebut diantaranya adalah :

1. Kebijakan menaikkan BBM
2. Kenaikan tarif dasar listrik
3. Kebijakan peningkatan persentase perhitungan PPN
4. Tarif cukai rokok yang naik secara bertahap

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sukamara, TPID melalui dinas teknis selain melakukan pemantauan harga komoditas penyumbang inflasi juga melakukan beberapa langkah strategis sebagai upaya pengendalian. Dengan menyusun program kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara dan Dana Insentif Fiskal, TPID Kabupaten Sukamara melakukan beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan kebijakan dalam hal penanganan inflasi daerah di Kabupaten Sukamara. kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sidak Pasar secara berkala untuk memantau harga komoditas pada saat terjadi lonjakan harga yang signifikan atau memantau stok persediaan komoditas pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional dan event besar di Kabupaten Sukamara.

2. Gerakan Tanam Cepat Panen

Dalam upaya menjaga ekspektasi masyarakat pada saat menghadapi cuaca ekstream dilakukan beberapa upaya salah satunya upaya budidaya melalui pertanian modern (smart farming /green house). Memastikan bahwa bantuan untuk tanaman cepat panen juga bisa terus di produksi berkelanjutan dan menjadi penyangga pangan tahap awal dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Kegiatan ini sebagai upaya menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis yang sering kali mempengaruhi inflasi. Penanaman dengan sarana green house dapat melindungi tanaman dari cuaca ekstrim.

Dengan adanya kegiatan gerakan tanam cepat panen dan bantuan pada sektor peternakan ini diharapkan dapat menstabilkan harga di tingkat pasar. Beberapa komoditas yang dibantukan kepada petani adalah benih cabe, terong, sawi, tomat, jagung manis, pare, benih sayuran, pupuk kandang serta benih padi dan komoditas peternakan yaitu ayam dan bebek. Gerakan tanam cepat panen diberikan kepada 25 Kelompok Wanita Tani dan 5 Kelompok Tani serta 4 Kelompok Peternak.

3. Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dikenal dengan istilah Rumah Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah rawan pangan sebagai pengendalian inflasi di daerah, penurunan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Dalam rangka mencapai upaya tersebut kegiatan Rumah Pangan B2SA dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan bagi rumah tangga pemenuhan pola konsumsi sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Lokasi kegiatan Rumah Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) tersebar di wilayah Kabupaten Sukamara, yang meliputi :

1. Kecamatan Sukamara : KWT Pertiwi Kelurahan Mendawai dan KWT Pudu Rundun Desa Pudu.
2. Kecamatan Balai Riam : KWT. Bekerja Bersama Desa Pempaning, KWT. Jihing Anugrah Desa Jihing, KWT. Karya Bersama Desa Bangun Jaya, KWT. Karya Kusuma Desa Bukit Sungkai, KWT. Maju Bersama Desa Bangun Jaya, KWT. Melati Jaya Desa Bukit Sungkai, KWT. Melati Jaya Desa Sekuningan Baru, KWT. Nibung Seribu Desa Air Dua, KWT. Selalu di Hati Desa Lupu, KWT. Sumber Rejeki Desa Sekuningan Baru.
3. Kecamatan Jelai : KWT. Cempaka Baru Desa Sungai Bundung, KWT. Mekar Sari Desa

Sungai Raja, KWT. Mekar Sari Desa Pulau Nibung.

4. Kecamatan Pantai Lunci : KWT. Asoka Desa Sungai Cabang Barat, KWT. Serumpun Desa Sungai Tabuk, KWT. Berkah Lestari Desa Sungai Tabuk, KWT. Beruntung Asri Desa Sungai Pasir, KWT. Melati Desa Sungai Pasir, KWT. Mufakat Baru Desa Sungai Pasir, KWT. Permata Bunda Desa Sungai Pasir.
5. Kecamatan Permata Kecubung : KWT. Mekar Bersama Desa Natai Kondang.

Adapun jenis barang yang dihibahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara, yang diterima oleh masing-masing Kelompok Wanita Tani (KWT) di wilayah Kabupaten Sukamara berupa :

1. Benih cabe
2. Benih tomat
3. Benih terong
4. Sawi hijau
5. Jagung manis
6. Pare
7. Benih sayuran
8. Pupuk kandang
9. Dolomit
10. Pupuk unorganik
11. NPK mutiara
12. Pestisida (fungisida)
13. Pestisida (insectisida)

4. Preman Laskar (PRogram pEMANfaatan LAhan bekaS Kebakaran dan terlantAR)

Sebagai langkah konkrit mengatasi kelangkaan beras dan pelaksanaan Program Pemanfaatan Lahan Bekas Kebakaran dan Terlantar (Preman Laskar) yang merupakan Program Kerja TPID Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Sukamara menggalakkan masyarakat untuk menanam padi seluas 611 Ha di Desa Sungai Pasir dan Desa Pulau Nibung yang sudah di panen keseluruhan dan bisa memproduksi beras sekitar 1.781 ton. Dan untuk menjaga keberlanjutan maka Pemerintah Kabupaten Sukamara membagikan kembali bibit padi untuk tanam tahap - 2 periode April - September 2024 dengan pertanaman seluas 23 ha. Dengan tetap menjaga keberlanjutan program ini diharapkan Kabupaten Sukamara bisa menjadi daerah yang mandiri pangan.

Dalam jangka menengah/panjang program memanfaatkan lahan terlantar dan bekas kebakaran sebagai penyangga pangan bisa menjadi penghasil komoditi yang bisa memenuhi kebutuhan di Kabupaten Sukamara dan wilayah di sekitarnya sehingga dapat berperan dalam pengendalian inflasi.

Sasaran jangka panjang yang diinginkan sebagai berikut :

1. Menghilangkan ketergantungan pemenuhan komoditas pangan terhadap daerah lain
2. Menstabilkan harga komoditas pangan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Menciptakan petani milenial yang produktif dan inovatif

5. Kegiatan Pasar Penyeimbang

Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perdagangan melaksanakan Kegiatan Pasar Murah sebagai bentuk intervensi terhadap lonjakan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru. Kegiatan tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti Beras Premium 5 kg, Minyak Goreng 2 Liter dan Gula 1 Kg dengan harga yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Berdasarkan Nota Dinas Nomor :510/359/DKUKMDAG/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pelaksanaan Pasar Penyeimbang Tahun 2024 maka nilai subsidi yang diberikan kepada penerima manfaat 43,66% atau dari harga paket bahan pokok Rp. 142.000 dijual dengan harga pemerintah/subsidi menjadi Rp. 80.000,-. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 maka jumlah paket bahan pokok yang dapat dijual sebanyak 1.612 paket. Kegiatan pasar penyeimbang di Kabupaten Sukamara dilaksanakan di 4 Desa/Kelurahan di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Sukamara. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 12 - 13 Desember 2024.

6. Gerakan Peternak Sadar Inflasi

Kenaikan harga daging ayam ras yang melanda hampir di seluruh Kalimantan tengah karena adanya Kegiatan Hari Besar Keagamaan Nasional dan beberapa event besar di Kabupaten Sukamara, sementara supplay yang menurun pasca Natal dan Tahun Baru membuat ayam ras habis dipotong bahkan untuk umur ayam yang belum layak jual, sehingga peternakan memerlukan siklus waktu lebih lama untuk melakukan pemotongan ayam ras sesuai standar umur dan bobot. Adanya pengurangan jatah bibit ayam ras untuk perusahaan - perusahaan yang jadi pemasok peternakan di Kabupaten Sukamara membuat harga daging ayam ras menjadi melonjak tajam.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui TPID melakukan rapat koordinasi secara intens dengan pelaku peternakan dan pedagang ayam ras dalam mengatur pola panen di kandang untuk menjaga kestabilan ketersediaan ayam ras, meminta penjualan daging ayam ras mengutamakan pemenuhan kebutuhan pasokan di pasar - pasar di Kabupaten Sukamara, dan mengedukasi pelaku usaha peternakan ayam ras untuk peduli dengan inflasi yang akan berpengaruh secara massif untuk kegiatan usaha lainnya.

Kegiatan ini berpengaruh signifikan terhadap harga jual daging ayam ras di pasar, terbukti di akhir September 2024 harga ayam ras tercatat diharga Rp. 35.000 - Rp. 40.000/kg yang awalnya stagnan di harga Rp. 45.000 - Rp. 50.000/kg.

7. Memperkuat Kelambagaan

TPID melalui Dinas Perikanan memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, alat penangkap ikan ramah lingkungan, sarana dan prasarana budidaya ikan untuk diberikan kepada pelaku usaha perikanan secara berkelompok. Sampai dengan Desember 2024 sudah terealisasi sebesar Rp. 8.311.068.149,- berupa bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan alat penangkap ikan ramah lingkungan yang disalurkan

kepada 14 (empat belas) Kelompok Pengolah Pemasar, 51 (lima puluh satu) Kelompok Usaha Bersama dan 26 (dua puluh enam) Kelompok Pembudidaya Ikan. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban biaya operasional petani perikanan sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

8. Progran KURDA Sukma

Dalam upaya memperkuat permodalan pelaku UMKM, Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan bantuan berupa subsidi suku bunga bagi para pedagang UMKM sejak tahun 2023. Bekerjasama dengan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sukamara penyaluran kredit KURDA SUKMA diharapkan mampu memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM. Dengan suku bunga 12% pertahun, Pemerintah Kabupaten Sukamara mensubsidi sebesar 9% sehingga suku bunga yang di bebaskan ke nasabah UMKM hanya sebesar 3%. Tahun 2024, hingga saat ini PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sudah menyalurkan kredit sebesar Rp. 5.230.000.000 dengan baki debet sebesar Rp. 2.914.519.250 dan biaya yang sudah di subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 444.037.500 kepada 167 nasabah UMKM (130 debitur exsisting dan 37 debitur lunas)

9. Menjaga Kestabilan Neraca Pangan

1. Penugasan kepada PT. Sukma Jaya Distribusi yang merupakan anak perusahaan salah satu BUMD aneka Usaha milik Pemerintah Kabupaten Sukamara PT. Bangun Sukma Jaya untuk menyediakan komoditas pangan pokok yaitu beras, gula, minyak goreng, garam dan jagung.
2. Kerjasama antar daerah sudah dilaksanakan namun oleh BUMD di Kabupaten Sukamara yaitu PT. Bangun Sukma Jaya yang melakukan kerjasama dengan BUMD daerah lain untuk memenuhi pasokan beras dan minyak goreng.
3. Memaksimalkan kerjasama dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan pokok di Rumah Pangan Kita (RPK).
4. Menjaga ekspektasi inflasi dengan memastikan kepada masyarakat bahwa stok tidak terbatas sehingga tidak ada penimbunan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dengan terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah kabupaten Sukamara telah menyusun program kerja dan mempersiapkan rancangan pelaksanaan kegiatan dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sukamara. Selain mengikuti rapat via zoom meeting yang dilaksanakan tiap minggu dengan Kementerian Dalam Negeri, TPID Kabupaten Sukamara juga secara rutin mengadakan rapat internal dan pelaporan harga komoditas pangan. Namun ada beberapa hal yang harus lebih dimaksimalkan lagi dalam upaya memitigasi masalah penanganan inflasi di Kabupaten sukamara, antara lain :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan TPID Kabupaten Sukamara dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Sukamara.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam memenuhi kebutuhan komoditas pangan

2.

secara mandiri sudah mulai teratasi sedikit demi sedikit, diharapkan program dan kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan sehingga Kabupaten Sukamara bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan dalam menyikapi kenaikan harga komoditas pangan ayam ras, telur ayam ras dan tahu mentah, sekaligus rekomendasi pengendalian inflasi di Kabupaten Sukamara secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Meminta kepada OPD terkait dapat mengalokasikan dana untuk pengendalian inflasi dan menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan dana yang bersumber dari Biaya Tak Terduga untuk penanganan inflasi.
2. Melaksanakan operasi pasar yang bekerjasama dengan Bulog untuk menyediakan secepatnya komoditas pangan yang sedang melonjak tajam.
3. Memaksimalkan pasar penyeimbang yang sudah dilaksanakan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang bekerjasama dengan Bulog.
4. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi.
5. Memaksimalkan program integrasi pertanian dan peternakan terpadu secara berkesinambungan untuk meningkatkan produksi pangan.
6. Melakukan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya menjaga inflasi daerah.
7. Penyusunan Informasi Neraca Beras Daerah dan Digitalisasi Harga Pangan Terintegrasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
8. Penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri seperti beras, cabe, sayur - sayuran, daging ayam ras dan telur dengan memanfaatkan lahan terlantar dan eks terbakar untuk tanaman cepat panen.
9. Diminta kepada Dinas Perhubungan untuk menjaga arus transportasi agar biaya tetap stabil dengan kembali mengaktifkan transportasi Bus Damri yang bisa memfasilitasi transportasi dalam daerah dan daerah tetangga terdekat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.